Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 29864-29871

Tantangan dan Inovasi Politik Kebijakan Pendidikan Masa Depan: Narasi Reformasi dan Transformasi Digital

Anggun Rahmadani[1], Erma Novianti[2], Siti Walbaradi[3], Giva Imelsa Leka Putri[4], Afriantoni[5]

[1,2,3,4,5]Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : rahmadanianggun6@gmail.com, enovianti821@gmail.com, siwalll146@gmail.com, givaimelsa80@gmail.com, afriantoni_uin@radenfatah.ac.id

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan di era digital menghadapi dinamika yang kompleks akibat pengaruh perkembangan teknologi, kepentingan politik, serta kesiapan sistem pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dalam perumusan kebijakan pendidikan, mengidentifikasi tantangan reformasi di era digital, serta mengkaji peran transformasi digital dalam mendorong kebijakan yang inovatif, adaptif, dan inklusif. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi terhadap perubahan. Selain itu, inkonsistensi kebijakan akibat dinamika politik turut memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan. Namun, transformasi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan melibatkan aktor politik, pemerintah, dan pemangku kepentingan guna menciptakan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masa depan.

Kata kunci: Kebijakan pendidikan, transformasi digital, dinamika politik, inovasi pendidikan, literasi digital

ABSTRACT

Education policy in the digital era faces complex dynamics influenced by technological advancements, political interests, and the readiness of the education system. This study aims to analyze political dynamics in the formulation of education policy, identify the challenges of policy reform in the digital era, and examine the role of digital transformation in fostering innovative, adaptive, and indusive policies. The method used is a qualitative approach with a descriptive design through literature analysis. The findings indicate that education policy still encounters several obstades, induding unequal access to technology, low digital literacy among educators, limited infrastructure, and resistance to change. In addition, policy inconsistency due to political dynamics affects the effectiveness of implementation. However, digital transformation provides significant opportunities to improve education quality through technology utilization and data-driven decision-making. Therefore, comprehensive, collaborative, and sustainable strategies involving political actors, government, and stakeholders are essential to develop responsive education policies for future needs.

Keywords: Education policy, digital transformation, political dynamics, educational innovation, digital literacy

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Di era digital saat ini, kebijakan pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga diarahkan pada kemampuan sistem pendidikan dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam

proses pembelajaran, manajemen pendidikan, hingga pola interaksi antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan dituntut untuk mampu merespons perubahan tersebut secara cepat, tepat, dan berkelanjutan agar pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam proses perumusannya, kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh dinamika politik. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah, aktor politik, lembaga pendidikan, serta berbagai kelompok masyarakat. Perubahan kepemimpinan dan prioritas politik sering kali memengaruhi arah kebijakan pendidikan yang diterapkan. Di era digital, kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena pemerintah dituntut untuk menghadirkan sistem pendidikan yang mampu mendukung transformasi teknologi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, kebijakan pendidikan harus mampu menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.

Transformasi digital dalam dunia pendidikan memberikan peluang besar bagi terciptanya sistem pembelajaran yang lebih modern, fleksibel, dan inovatif. Pemanfaatan teknologi seperti platform pembelajaran daring, kecerdasan buatan, dan sistem informasi pendidikan memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan efisien. Selain itu, teknologi juga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat. Kehadiran teknologi digital menjadikan pendidikan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat dari berbagai wilayah.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet stabil dan perangkat teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan pendidikan digital belum berjalan secara merata. Akibatnya, kualitas pendidikan antarwilayah masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan.

Selain masalah infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan reformasi kebijakan pendidikan di era digital. Tenaga pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi pendidikan. Rendahnya kemampuan digital tersebut menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi dan mengurangi efektivitas kebijakan pendidikan yang telah dirancang pemerintah.

Di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan tantangan dalam aspek budaya dan pola pikir masyarakat pendidikan. Sebagian lembaga pendidikan dan tenaga pendidik masih mempertahankan metode pembelajaran konvensional serta menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Padahal, perkembangan teknologi menuntut adanya inovasi dan adaptasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, reformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan kebijakan, tetapi juga perubahan paradigma dalam memandang proses pembelajaran agar lebih terbuka terhadap inovasi digital.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, transformasi digital tetap memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan inklusif. Teknologi memungkinkan peserta didik dari berbagai latar belakang memperoleh akses pendidikan yang lebih luas tanpa dibatasi kondisi geografis. Selain itu, kebijakan pendidikan berbasis digital juga dapat membantu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih personal sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dengan demikian, transformasi digital menjadi salah satu solusi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat pemerataan akses belajar di masa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengintegrasikan reformasi kebijakan pendidikan dengan transformasi digital. Pemerintah, aktor politik, tenaga pendidik, serta seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang inovatif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan pembelajaran di masa depan. Dukungan terhadap pemerataan infrastruktur, peningkatan kompetensi digital tenaga pendidik, serta penguatan kolaborasi antarstakeholder menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan pendidikan di era digital serta peran berbagai aktor dalam proses perumusannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif dan kontekstual, khususnya terkait aspek politik, sosial, dan teknologi dalam kebijakan pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan diutamakan yang terbit dalam kurun waktu terbaru guna memastikan relevansi dengan perkembangan era digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan dinamika politik, reformasi kebijakan pendidikan, serta transformasi digital dalam pendidikan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti dinamika politik, tantangan reformasi, peran teknologi, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dari sumber yang berbeda guna memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan mendalam mengenai kebijakan pendidikan di era digital serta implikasinya terhadap masa depan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan di era digital dipengaruhi secara kuat oleh dinamika politik, kesiapan sistem, serta perkembangan teknologi yang menuntut inovasi berkelanjutan. Reformasi kebijakan pendidikan menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi terhadap perubahan, sehingga implementasinya belum merata dan optimal. Meskipun demikian, transformasi digital memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data, serta membuka peluang peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan melibatkan aktor politik, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pendidikan tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembelajaran secara merata dan efektif di masa depan.

1. Dinamika Politik dalam Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pendidikan di Era Digital

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang tidak terlepas dari dinamika politik dalam proses perumusannya. Dalam konteks era digital, kebijakan pendidikan semakin dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, maupun aktor non-negara. Menurut Jannah, kebijakan pendidikan memiliki fungsi strategis dalam mencapai tujuan nasional, sehingga proses perumusannya harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat(Jannah, N. W., Jannah, F., Adri, R., & Ananda, 2023).

Dalam era digital, dinamika politik semakin kompleks karena adanya tuntutan global untuk melakukan transformasi pendidikan berbasis teknologi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari agenda nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Nashrullah, kebijakan transformasi digital dalam pendidikan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi serta penguatan kinerja tenaga pendidik(Nashrullah, M., Rahman, S., Majid, A., Hariyati, N., 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, dinamika politik sering kali memengaruhi konsistensi kebijakan pendidikan. Pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas politik dapat menyebabkan kebijakan yang telah dirancang tidak berjalan secara berkelanjutan. Bahkan, dalam beberapa kasus,

kebijakan digitalisasi pendidikan lebih bersifat simbolik daripada substantif karena belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, implementasi kebijakan pendidikan di era digital juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan pemerataan. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat sering kali tidak dapat diimplementasikan secara optimal di daerah karena adanya perbedaan kondisi infrastruktur dan sumber daya. Dalam kajian Sofiani, dijelaskan bahwa transformasi pendidikan di era digital menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta kesiapan sumber daya manusia yang belum merata(Sofiani, I. K., Basir, A., Eliza, F., & Juliana, 2025).

Dengan demikian, dinamika politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan di era digital. Kebijakan yang efektif tidak hanya memerlukan dukungan politik yang kuat, tetapi juga harus disertai dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta komitmen jangka panjang agar transformasi pendidikan dapat berjalan secara optimal dan merata.

2. Tantangan Utama dalam Reformasi Kebijakan Pendidikan di Tengah Perkembangan Teknologi Digital

Reformasi kebijakan pendidikan di era digital dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh dalam mengadopsi perubahan. Dalam konteks ini, kesenjangan akses teknologi masih menjadi persoalan utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pendidikan berbasis digital. Hidayat, menegaskan bahwa ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan distribusi layanan pendidikan tidak merata, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah(Hidayat, T., Rizal, A., & Anwar, 2023).

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, juga menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan reformasi kebijakan pendidikan. Transformasi digital menuntut guru untuk tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Prasetyo, tingkat literasi digital tenaga pendidik di Indonesia masih relatif rendah, sehingga menghambat optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran(Prasetyo, D., Lestari, S., & Wibowo, 2024).

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dan pendanaan turut memperkuat hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis digital. Tidak semua lembaga pendidikan memiliki akses terhadap perangkat teknologi yang memadai maupun jaringan internet yang stabil. Rahmawati menunjukkan bahwa ketimpangan fasilitas digital masih menjadi kendala utama dalam mendukung transformasi pendidikan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya(Rahmawati, S., Nugroho, H., & Putri, 2025).

Tantangan reformasi kebijakan pendidikan juga berkaitan dengan aspek kultural, yaitu adanya resistensi terhadap perubahan. Sebagian tenaga pendidik dan institusi pendidikan masih mempertahankan pendekatan konvensional dalam pembelajaran dan belum sepenuhnya terbuka terhadap inovasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya memerlukan intervensi kebijakan dan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam praktik pendidikan itu sendiri.

Dengan demikian, reformasi kebijakan pendidikan di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjawab berbagai tantangan tersebut secara simultan, melalui pemerataan akses teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur pendidikan. Tanpa adanya upaya yang terintegrasi, transformasi pendidikan berbasis digital berisiko tidak berjalan optimal dan justru memperdalam kesenjangan yang telah ada.

3. Peran transformasi digital dalam mendorong inovasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan inklusif

Transformasi digital dalam pendidikan berperan sebagai pendorong utama perubahan kebijakan ke arah yang lebih fleksibel dan terbuka. Dengan hadirnya teknologi seperti platform pembelajaran daring, kecerdasan buatan, dan sistem berbasis data, proses pendidikan tidak lagi bersifat

seragam, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Hal ini mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, yaitu kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan kemampuan, minat, serta gaya belajar siswa (Darmayasa et al., 2025).

Selain itu, transformasi digital juga memperluas akses pendidikan sehingga menjadi lebih inklusif. Peserta didik dari berbagai latar belakang, termasuk yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan tertentu, dapat tetap memperoleh layanan pendidikan melalui teknologi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan mulai diarahkan untuk menjamin pemerataan akses belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu(Ghozali et al., 2024).

Di sisi lain, penggunaan teknologi memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Pemerintah dapat memantau perkembangan pendidikan secara real-time dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menjadikan kebijakan pendidikan tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga membentuk kebijakan pendidikan yang lebih inovatif, adaptif, dan inklusif

4. Sejauh Mana Kebijakan Pendidikan Saat Ini Mampu Menjawab Kebutuhan Pembelajaran Di Masa Depan Berbasis Teknologi

Kebijakan pendidikan saat ini pada dasarnya sudah menunjukkan arah yang sesuai dengan kebutuhan masa depan berbasis teknologi. Berbagai program seperti digitalisasi pendidikan, penguatan literasi digital, serta pengembangan kurikulum yang menekankan keterampilan abad ke-21 menjadi bukti bahwa sistem pendidikan mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kebijakan tersebut mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak(Marif et al., 2025).

Namun, kemampuan kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan masa depan belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan infrastruktur, di mana tidak semua wilayah memiliki akses internet dan fasilitas teknologi yang memadai. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru, masih bervariasi. Tidak semua pendidik memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi secara maksimal.

Permasalahan lain terletak pada implementasi kebijakan yang belum merata. Meskipun kebijakan di tingkat pusat sudah cukup baik, pelaksanaannya di daerah sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana, dukungan, dan kondisi lingkungan pendidikan yang berbeda-beda(Samhaji & Anggara, 2025).

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk menghadapi masa depan berbasis teknologi, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam hal pemerataan akses, peningkatan kompetensi guru, serta konsistensi dalam pelaksanaan agar dapat benar-benar menjawab kebutuhan pembelajaran di masa depan.

5. Strategi yang Efektif Untuk Mengintegrasikan Reformasi Kebijakan Pendidikan dengan Transformasi Digital Secara Berkelanjutan

Integrasi teknologi telah mempercepat inisiatif transformasi pendidikan di sejumlah negara. Indonesia menyesuaikan strategi teknologi pendidikan dengan kesiapan infrastruktur negara dan memprioritaskan alat-alat yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak secara efektif. Teknologi umumnya digunakan sebagai katalisator untuk mendorong perubahan di banyak sektor, termasuk pendidikan. Sejumlah negara telah menggunakan teknologi untuk mendukung intervensi pendidikan.

Di Estonia20, platform eKool berfungsi sebagai alat manajemen sekolah yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara murid, orang tua, sekolah, dan badan pengawas. Platform ini membantu murid mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik, menjadi penghubung antara orang tua dan sekolah dalam mengawasi dan mengomunikasikan kemajuan murid, serta menjadi portal sumber belajar dan pengajaran. Mengutip situs resmi eKool21 pada 3 November 2023, eKool kini menawarkan lebih dari 97 juta pelajaran dan penggunanya telah bertukar lebih dari 56 juta pesan. Angka ini menunjukkan tingginya daya tarik dan pemanfaatan platform(Balitbang Kemendikbud, 2019).

Di Singapura22, *Student Learning Space* (SLS) yang diluncurkan pada 2017 berfungsi menyediakan sumber daya pendidikan, alat penilaian, dan beragam fitur untuk memantau kemajuan

murid. Platform ini juga menyediakan dasbor bagi guru untuk melacak kinerja murid dan merencanakan pembelajaran. Terdapat pula fitur galeri komunitas yang menjadi media bagi guru untuk berbagi pengetahuan dengan rekan-rekannya dan menemukan inspirasi.

Belajar dari pengalaman sejumlah negara, salah satu manfaat utama penerapan teknologi dalam bidang pendidikan adalah mempercepat proses implementasi inisiatif pendidikan dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Teknologi juga mempermudah akses untuk mendapatkan materi pendidikan yang berkualitas.Singapura adalah contoh negara yang berhasil memanfaatkan kekuatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan, memaksimalkan dampak kebijakan, serta mendorong kemajuan sosial dan ekonomi.

Badan Teknologi Pemerintah Singapura (*GovTech*) menciptakan *Singapore Government Technology Stack* (SGTS), yakni kumpulan layanan dan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh semua lembaga pemerintah untuk mengembangkan aplikasi digital mereka sendiri. Inisiatif tersebut terbukti menghemat waktu dan tenaga dalam memperkenalkan layanan digital baru karena pendekatannya yang lebih dinamis dibandingkan dengan regulasi teknologi dari pemerintah.

Projek *MyInfo* diluncurkan sebagai program percontohan dari *SGTS*. Program ini menawarkan layanan Tell us once yang memungkinkan pengguna untuk mengisi data diri melalui media daring secara otomatis. Fitur tersebut mampu memangkas waktu yang diperlukan untuk memasukkan informasi atau menyertakan dokumen pendukung. Dengan memanfaatkan SGTS, program percontohan *MyInfo* berhasil dikembangkan dan dilaksanakan hanya dalam waktu empat bulan, sementara biasanya dapat menghabiskan waktu satu tahun(Singapura., 2023).

Untuk menghadapi tantangan berat dan keharusan untuk bertindak cepat, Indonesia juga berupaya menggunakan teknologi untuk membantu penerapan solusi terhadap akar permasalahan pendidikan. Pemanfaatan teknologi perlu dilakukan mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia. Tanpa intervensi teknologi, diperlukan waktu puluhan tahun untuk dapat mewujudkan transformasi sistemik. Seperti yang diungkapkan oleh UNESCO dalam Laporan Pemantauan Pendidikan Global23 mengenai teknologi dalam pendidikan: "*Teknologi tidak perlu canggih untuk dapat memberikan dampak, tetapi teknologi harus spesifik sesuai dengan konteksnya*."

6. Peran Aktor Politik, Pemerintah, dan Pemangku Kepentingan dalam Menciptakan Kebijakan Pendidikan yang Inovatif

Peran aktor politik, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang inovatif sangat penting karena kebijakan pendidikan tidak lahir secara netral, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kepentingan, kekuasaan, dan kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam kebijakan pendidikan dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan kualitas sumber daya manusia.

Pertama, aktor politik memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pendidikan. Aktor politik, seperti anggota legislatif dan elit partai, berfungsi dalam proses perumusan regulasi, penganggaran, serta pengawasan kebijakan. Melalui fungsi legislasi, mereka dapat mendorong lahirnya kebijakan yang inovatif, misalnya dengan mengesahkan undang-undang yang mendukung digitalisasi pendidikan atau kurikulum berbasis kompetensi. Namun, peran ini juga rentan terhadap kepentingan politik jangka pendek, sehingga inovasi kebijakan terkadang dipengaruhi oleh agenda kekuasaan, bukan semata kebutuhan pendidikan(Imamia et al., 2025).

Kedua, pemerintah sebagai eksekutor kebijakan memiliki peran utama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Pemerintah, khususnya melalui kementerian pendidikan, bertanggung jawab dalam menyusun kurikulum, menetapkan standar nasional pendidikan, serta memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Inovasi yang dilakukan pemerintah dapat berupa penerapan kurikulum merdeka, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan dan memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Ketiga, pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting. Mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak kebijakan pendidikan. Keterlibatan stakeholders dalam proses perumusan kebijakan dapat meningkatkan relevansi dan keberterimaan kebijakan tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah dan stakeholders juga dapat mendorong inovasi, seperti pengembangan program link and match antara sekolah dan industri(Mustofa, 2025).

Selain itu, sinergi antara ketiga pihak tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang inovatif. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak efektif atau sulit diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif, transparansi, serta komunikasi yang intensif antara aktor politik, pemerintah, dan pemangku kepentingan(Iswahyudi et al., 2023).

Dengan demikian, inovasi dalam kebijakan pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil kolaborasi berbagai aktor yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana ketiga elemen tersebut mampu bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan di era digital merupakan hasil interaksi yang kompleks antara dinamika politik, kesiapan sistem pendidikan, serta perkembangan teknologi. Dinamika politik memiliki pengaruh signifikan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, terutama dalam menentukan arah, prioritas, serta keberlanjutan program pendidikan. Namun, perubahan kepemimpinan dan kepentingan politik sering kali menyebabkan inkonsistensi kebijakan, sehingga menghambat tercapainya transformasi pendidikan yang optimal.

Selain itu, reformasi kebijakan pendidikan di era digital masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur, serta adanya resistensi terhadap perubahan menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan perubahan paradigma dalam praktik pendidikan.

Di sisi lain, transformasi digital memberikan peluang besar dalam mendorong inovasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel serta memperluas akses pendidikan bagi berbagai kalangan. Hal ini menjadi dasar penting bagi pengembangan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembelajaran di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam mengintegrasikan reformasi kebijakan pendidikan dengan transformasi digital. Sinergi antara aktor politik, pemerintah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan inovatif. Dengan adanya kerja sama yang kuat serta komitmen jangka panjang, diharapkan kebijakan pendidikan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan dengan tuntutan zaman.

REFERENCES

Balitbang Kemendikbud. (2019). *Kajian implementasi kurikulum 2013*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Darmayasa, D., Lakadjo, M. A., Juasa, A., Rianty, E., Efitra, E., Wirautami, N. L. P., & Calam, A. (2025). *Pendidikan Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.

Ghozali, S., Darmawan, D., Putra, A. R., Arifin, S., Arrozi, F., Firmansyah, B., & Al Mursyidi, B. M. (2024). Literasi digital sebagai pilar peningkatan kualitas pendidikan modern. *Jurnal Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 1–17.

Hidayat, T., Rizal, A., & Anwar, K. (2023). Kesenjangan Digital dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Idaarah*, *7*(2), 110–115.

Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit: Kramantara JS.

Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E.

(2023). *Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Jannah, N. W., Jannah, F., Adri, R., & Ananda, R. (2023). Konsep Kebijakan dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(2), 2.
Marif, H., Al Mu'allif, M. B., Nafis, A., Makmun, S., & Ahid, N. (2025). Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah: Kajian Teoritis dan Konseptual di Era Digital. *Paedagogos: Journal of Education and Learning*, *1*(2), 67–81.
Mustofa, W. (2025). Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan: Kajian Literatur terhadap Hubungan Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 163–174.
Nashrullah, M., Rahman, S., Majid, A., Hariyati, N., & B. (2024). Transformasi Digital dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *7*(1), 54–55.
Prasetyo, D., Lestari, S., & Wibowo, A. (2024). Literasi Digital Guru dalam Implementasi Pembelajaran Berbasis Teknologi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan*, *6*(1), 40–48.
Rahmawati, S., Nugroho, H., & Putri, A. (2025). Tantangan Transformasi Digital dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, *10*(1), 75–82.
Samhaji, S., & Anggara, F. D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan pada Daerah Tertinggal Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, *5*(2), 99–112.
Singapura., K. P. (2023). *"Transforming Education through Technology" Masterplan 2030*. Kementrian Pendidikan Singapura.
Sofiani, I. K., Basir, A., Eliza, F., & Juliana, V. (2025). Transformasi Pendidikan Indonesia -Malaysia di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(2), 63–65.